

# **BAB 1**

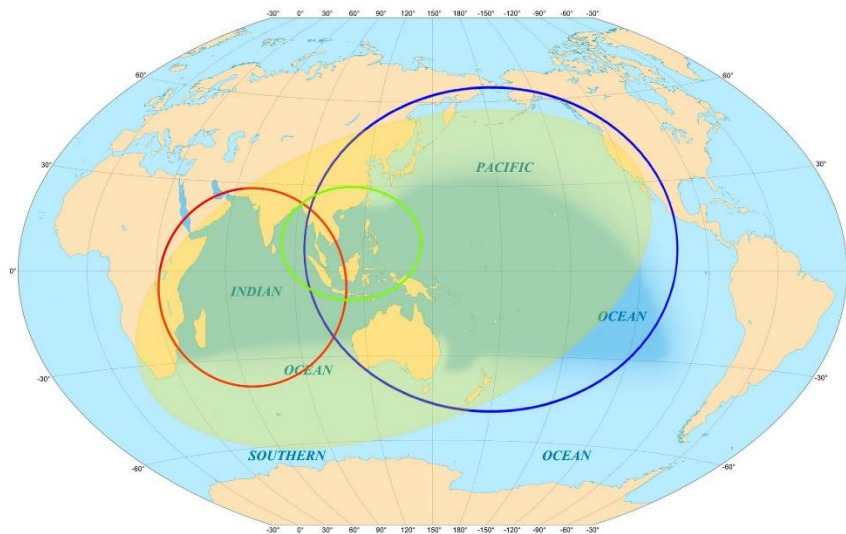
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indo-Pasifik merupakan sebuah penamaan kawasan sebagai pengganti Asia-Pasifik yang sebelumnya telah melekat, dengan perbedaan mendasar pada penggunaan wilayah berkaitan domain perairan (Pangestu et al, 2021). Tidak seperti Asia Tenggara atau Eropa Timur, wilayah Indo-Pasifik dimaknai bukan dalam arti wilayah regional yang dibentuk atas dasar kawasan yang terintegrasi, melainkan pelibatan dua samudra utama dunia yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik menjadi satu kesatuan zona maritim. Integrasi perairan dua samudra ini membentuk tatanan kebijakan luar negeri, pertahanan, juga ekonomi di kawasan (Medcalf, 2018). Mengacu pada konstruksi security order Indo-Pacific jelas mengedepankan sebuah kepentingan maritim. Cakupan wilayah juga kepentingan yang saling terhubung menuntut terjaminnya keamanan di laut. Berbagai kegiatan ekonomi tiap-tiap negara yang dipengaruhi oleh stabilitas dan keamanan maritim menjadi sebuah dasar pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya konsep Indo-Pasifik sebagai sebuah area belahan dunia baru dalam percaturan politik dan keamanan global (Simón, 2013).

Indo-Pasifik menjadi wilayah perairan yang merepresentasikan teater yang semakin kritis bagi geopolitik maritim keamanan. Perdagangan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan menjadi isu-isu yang terus mereformasi kawasan ini menjadi persilangan utama hubungan internasional di mana samudra Hindia dan Pasifik disatukan oleh arus sumber daya alam, rantai pasokan, dan jaringan distribusi global (Ramadhan, 2018). Di fase yang sama, negara-negara pesisir di Indo-Pasifik menghadapi tatanan kebijakan juga tantangan penguatan yang signifikan dari berbagai aspek termasuk perselisihan perbatasan wilayah, kompetisi kekuatan maritim, konflik perebutan sumber daya dan

infrastruktur kelautan dan pesisir, pembajakan, penyelundupan, dan perdagangan ilegal di laut terbuka (Michel & Passarelli, 2014).



**Gambar 1.1 Peta Kawasan Indo-Pasifik**

Sumber: (Gaba, 2020)

Indo-Pasifik telah muncul sebagai pusat gravitasi untuk persaingan kekuatan utama (Harun, 2022). Dengan kehadiran aktor-aktor major power di kawasan Indo-Pasifik berimplikasi pada timbulnya ancaman bagi stabilitas keamanan kawasan yang sejatinya berbagai dimensi ancaman bersama dalam tatanan kawasan Indo-Pasifik berkaitan dengan sengketa batas wilayah serta keamanan di domain maritim (Purnama, 2017). Implikasi dari kondisi ini adalah mencuatnya konflik kedaulatan di Laut China Selatan yang melahirkan respon AS dan sekutunya dengan pembentukan pakta keamanan AUKUS. Stabilitas kawasan Asia Tenggara kemudian diwarnai dengan ketegangan atas sengketa Laut China Selatan yang melibatkan China, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Setiap konfrontasi militer antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan itu akan menimbulkan bencana bagi perdamaian dan stabilitas yang sejauh ini dinikmati oleh Indonesia dan negara-negara tetangganya. Sementara AUKUS yang dianggap sebagai anti-China terhadap perilaku dominasi

China di laut China Selatan. Baik AS dan Australia kritis terhadap perilaku tagresif China di Laut China Selatan (Harun, 2022).

Kehadiran China sebagai *new emerging power* di Asia, telah membawa dampak dan pandangan yang beragam dari aktor internasional. Banyak pihak mengkhawatirkan fenomena China sebagai kekuatan baru di kawasan dengan klaim sepihak yang agresif terhadap Laut China Selatan (LCS) (Iriawan, 2018). Dewasa ini, Laut China Selatan menjadi arena diskusi yang penting dalam tatanan global. Laut China Selatan merupakan sebuah perairan yang dianggap sangat kaya karena di dalamnya terkandung sumber daya luar biasa berupa gas alam dan minyak bumi. Sebagai jalur pelayaran internasional dan perdagangan dunia, Laut China Selatan memegang peranan strategis tidak hanya di kawasan, namun juga global. Dengan potensi dan pengalaman sejarah yang Panjang, Laut China Selatan menjadi teater konflik di kawasan yang melibatkan beberapa negara seperti Taiwan, China, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dalam upaya saling klaim wilayah ini. Seringkali dampak dari pada klaim tersebut hingga ke aktivitas pelanggaran oleh beberapa kapal patroli negara China, Vietnam, atau Malaysia terhadap batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia ( Djuyandi et al, 2021).

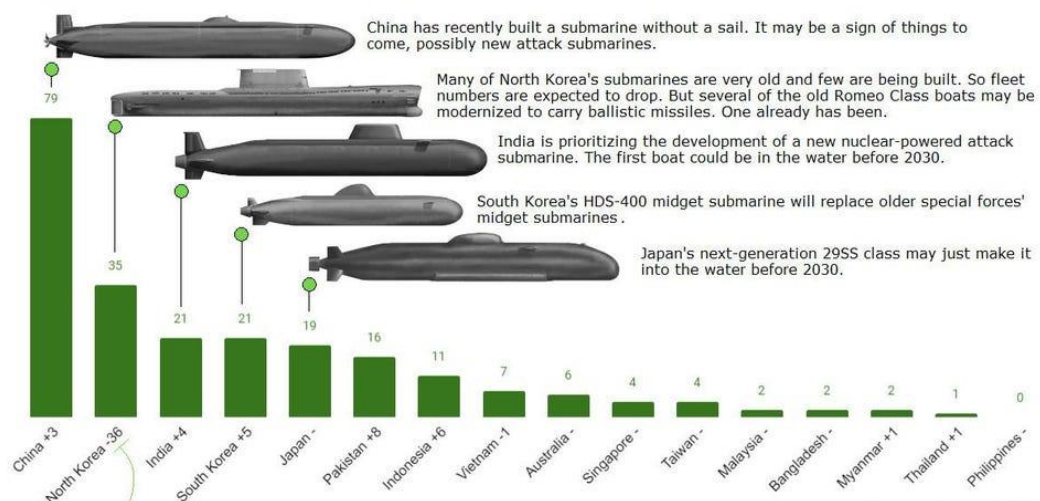
Di tengah naiknya tensi dalam pusaran konflik sengketa Laut China Selatan, AUKUS hadir sebagai aliansi baru di bawah kesepakatan trilateral yang mengatasnamakan dirinya sebagai pakta keamanan. Beberapa pengamat berpendapat bahwa aliansi yang terdiri dari AS, Inggris dan Australia tersebut merupakan sebuah manuver baru bagi poros sekutu untuk melawan dominasi China yang semakin agresif di kawasan Indo-Pasifik (Harun, 2022). Pada September 2021, AS, Inggris, dan Australia mengumumkan pembentukan aliansi yang dikenal sebagai pakta AUKUS, yang menyatukan kembali tiga negara yang berpandangan sama dalam menciptakan stabilitas kawasan. Tujuan utama pembentukan AUKUS adalah penyediaan serta pengembangan kapal selam bertenaga nuklir

untuk Angkatan Laut Australia yang rencananya akan dibangun di Adelaide (Prakoso, 2021). Ada persepsi bahwa pembentukan AUKUS bertujuan untuk melemahkan China dan melawan agresifitasnya di kawasan, khususnya di Laut China Selatan, wilayah sengketa beberapa negara di kawasan, termasuk China (Harun, 2022).

Menanggapi kepentingan maritim China yang berkembang di Indo-Pasifik, khususnya agresivitas China di Laut China Selatan yang terus menunjukkan eskalasi ketegangan, sejumlah negara di kawasan Indo-Pasifik telah membuat langkah signifikan untuk memodernisasi angkatan laut mereka (Kajiwara, 2020), termasuk kekuatan bawah air. Salah satu signifikansi kekuatan bawah air adalah kapal selam. Sebagai alutsista bernilai strategis tinggi, kapal selam dapat menimbulkan efek penangkalan (*deterrence effect*) bagi negara-negara di sekitar yang ingin melancarkan agresi. Kapal selam sangat ditakuti pada perang laut, karena gerakannya sulit dideteksi sehingga dapat menyusup ke jantung pertahanan lawan tanpa diketahui (Sulistijono, 2017). Di Kawasan, Vietnam menjadi salah satu negara yang memiliki visi jelas tentang pengerahan kapal selam strategis untuk merespon ancaman yang ditimbulkan oleh China. Vietnam telah membeli enam kapal kelas Kilo dari Rusia (Kajiwara, 2020). Taiwan dengan empat kapal selam tua yang masing-masing 2 buatan Belanda dan Amerika juga berencana membangun delapan buah lagi kapal selam di dalam negerinya. India, sejak 1967, setelah memperolehnya dari Uni Soviet, saat ini mengoperasikan 16 kapal selam termasuk akuisisi kapal selam bertenaga nuklir pada 2012, serta membangun kapal selam kelas Scorpene bekerja sama dengan produsen kapal Prancis. Di Malaysia, dua kapal selam yang dibeli dari Prancis pada 2009 dan 2010 telah ditugaskan. Singapura akan membeli empat kapal selam dari Jerman. Bangladesh dengan 2 kapal selam bekas yang diimpor dari China pada 2017. Thailand memutuskan untuk memiliki kapal selam pertama kalinya setelah membeli satu dari China dan berencana untuk membeli dua lagi. Sementara Pakistan dilaporkan berencana untuk membeli delapan kapal selam, empat

di antaranya akan dibangun di China dan empat lainnya akan dibangun di dalam negeri (Kajiwara, 2020). Pengadaan kapal selam secara umum diperoleh dengan membeli kapal selam bekas yang sudah pensiun dari negara asing; mengimpor produk jadi apa adanya; dan memperoleh lisensi produksi dan membangunnya di dalam negeri sendiri dengan dukungan dari luar negeri.

### Projected Asian Navies' Submarine Strength, 2030



**Gambar 1.2** Projek Kapal Selam Negara-Negara Asia 2030

Sumber: (Sutton, 2020)

Sementara dua kepala besarnya, China dan US, saing bersaing melesatkan pembangunan kekuatan bawah airnya untuk menjadi yang tak tertandingi di kawasan, bahkan global. Laporan Tahunan 2019 Departemen Pertahanan AS kepada Kongres menunjukkan bahwa China sedang mempercepat pengembangan teknologi inovatif seperti AI dan sistem tak berawak, dan bahwa modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) akan selesai pada tahun 2035, untuk mimpi mereka menjadi negara terkemuka dengan militer kelas dunia pada tahun 2049 (Kajiwara, 2020). Agresivitas pembangunan postur pertahanan bawah air China menantang supremasi AS yang dikenal dengan Kapal selam Angkatan Lautnya yang semuanya bertenaga nuklir. Tidak ada negara lain yang memiliki tingkat serangan dan kemampuan operasional yang sama dengan Amerika Serikat; dengan

demikian, Amerika Serikat terus mempertahankan supremasi pertahanan lautnya di bawah air.



**Gambar 1.3 Wahana Bawah Air Tanpa Awak US & China**

Sumber: (Sutton , 2020)

Masih di domain yang sama, penelitian dan pengembangan UUV adalah salah satu bidang utama persaingan antara Amerika Serikat dan China (Kajiwara, 2020). Upaya-upaya pembangunan postur bawah air dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengaruh di domain maritim kawasan Indo-Pasifik. Indo-Pasifik merupakan sebuah wilayah penyatuan domain maritim dua samudera yang strategis tata letaknya, baik dalam hal sumber daya laut yang terkandung di dalamnya, maupun posisi strategisnya dalam menyokong berbagai kebijakan maritim negara-negara di kawasan. Kondisi strategis LCS juga terkait pada peran wilayah tersebut yang menjadi bagian dari wilayah kedaulatan beberapa negara-negara. Hal tersebut yang pada kemudian mendeskripsikan kompleksitas atas interaksi antar negara di kawasan tersebut (Pedrason, 2021).

Berkaitan dengan kompleksitas yang kemudian seolah menghadirkan perlombaan kekuatan bawah air, Indonesia jelas tak mau

tinggal diam dan hanya menjadi pengamat di pinggir lintasan. Shang-su Wu seorang peneliti Nanyang Technological University Singapura dalam Kajiwara (2020), menulis bahwa “dengan beberapa selat strategis penting yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik di dalam perbatasannya, Indonesia tidak mungkin menghindari persaingan di antara kekuatan maritim, terutama antara China dan AS” dan “memiliki kemampuan angkatan laut tertentu sangat penting bagi Jakarta untuk melindungi kedaulatannya dan berfungsi sebagai alat tawar-menawar dalam realpolitik.” Indonesia secara aktif mencoba memanfaatkan kekuatan kapal selam dalam strategi keamanan nasionalnya (Kajiwara, 2020). Dalam pengadaan kapal selam, Indonesia telah bekerja sama dengan Korea Utara yang bukan hanya bersifat pembelian semata, namun juga transfer of technology. Dengan latar belakang keinginan Indonesia untuk memiliki sebanyak 12 unit kapal selam dalam rangka pemenuhan target pada 2024, dilaksanakan kerja sama pembelian dan *ToT* kapal selam dengan Korea Selatan. Sejak tahun 2011, kontrak antara Indonesia dan Korea Selatan senilai US\$ 1.1 miliar untuk pembelian 3 unit kapal selam DSME-209 telah ditandatangani (Al-Fadhat & Effendi, 2019).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total wilayah laut mencapai 5,9 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri atas 3,2 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum lagi dengan landas kontinennya. Luas perairan Indonesia ini merupakan hasil perjuangan pendahulu bangsa dalam deklarasi Djuanda yang kemudian ditegaskan oleh hukum laut internasional UNCLOS 1982 (Lasabuda, 2013 ). Dibenturkan dengan kompleksitas keamanan Kawasan Indo-Pasifik, tensi yang terus memanas di kawasan, terutama Laut China Selatan, memungkinkan sewaktu-waktu dapat terjadi pergesekan konflik yang berdampak bagi Indonesia. Di samping itu, Indonesia sendiri masih berjibaku dalam beberapa permasalahan perbatasan dengan negara tetangga yang sampai saat ini belum juga terselesaikan, belum lagi aktivitas militer bawah air yang makin marak di kawasan. Bila kondisi ini berlangsung

terus menerus, dimungkinkan dapat menimbulkan ketegangan yang berimplikasi pada hadirnya ancaman bagi kedaulatan negara (Marsetio & Ritonga, 2018). Dalam kaitan itu, untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari ancaman, kehadiran penguatan dimensi bawah air menjadi penting untuk dibahas.

Timbulnya Ancaman bagi kedaulatan negara bersinggungan erat dengan stabilitas maritim yang berkaitan dengan segala aspek dimensi kelautan, yang tidak hanya di permukaan namun juga di bawah permukaannya. Undang-undang kelautan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kelautan adalah segala hal yang berkaitan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air, dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dimensi bawah air merupakan gerbang yang begitu terbuka dari risiko ancaman dan pelanggaran. Pertama, berkaitan dengan aspek media yang begitu luas. Dimensi bawah air yang begitu luas memerlukan pertahanan ekstra karena tidak hanya berkaitan dengan cakupan luasnya wilayah, namun juga tinggi kolom airnya dari dasar ke permukaan. Kedua, sulitnya pendeteksian optimal atas dasar sifat air yang membatasi jarak pandang. Ketika terjadi penerobosan oleh objek objek atau wahana asing melalui bawah air akan cenderung tidak kasat mata dan lebih sulit terdeteksi, yang berbeda dengan objek-objek yang berada di atas permukaan, akan relatif lebih mudah terdeteksi bahkan dengan mata telanjang sekalipun. Ketiga, pertahanan bawah air menemukan beberapa kendala dengan masih minimnya Alutsista yang dimiliki oleh Indonesia dalam pertahanan wilayah berdimensi bawah air (Legionosuko et al, 2019). Penguatan dimensi bawah air dalam pertahanan Indonesia menjadi begitu penting untuk dipertanyakan keberadaannya ketika dalam kurun 5 tahun terakhir, pertahanan laut kita 'kebobolan' wahana nir-awak asing sebanyak tiga kali. Ketiga objek asing yang menerobos wilayah laut Indonesia ini adalah AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*) berbentuk seaglider dengan penemuan pertama pada Maret 2019, di perairan kepulauan Riau; kemudian

penemuan serupa terjadi di perairan Jawa Timur pada Januari 2020; dan terakhir, di perairan Selayar pada 26 Desember 2020. Jika diketahui negara pemilik AUV tersebut, maka negara tersebut melanggar *Article 17 Right of innocent passage* pada UNCLOS yang hanya memberikan hak lintas pada negara lain. Sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas riset kelautan atau survey hidrografi, apa lagi kegiatan spionase. Hukum laut internasional dalam UNCLOS memberikan hak lintas damai bagi kapal selam milik asing di perairan nasional, dilengkapi dengan peraturannya. Pada masa damai, dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan penegakan hukum di laut, Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) diselenggarakan melalui strategi penangkalan dan pengendalian laut.

Maksud dari penyusunan SPLN adalah untuk menentukan strategi pertahanan negara di laut yang tepat dalam menghadapi ancaman yang timbul. Tujuannya adalah untuk dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan dan upaya guna menjamin stabilitas keamanan di seluruh perairan yurisdiksi nasional dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI (MABESAL, 2004). Dalam bab pokok-pokok penyelenggaraan pertahanan laut nusantara di masa damai dalam SPLN, peneliti tidak menemukan adanya konsep dimensi bawah air secara eksplisit. Sementara dimensi bawah air menjadi domain baru pertahanan dalam lingkungan strategis masa kini di mana ancaman bisa saja berasal dari atau berada di sana. Banyak negara lain di kawasan Indo-Pasifik bergerak untuk memperkuat kemampuan militer bawah laut mereka melalui pengadaan berbagai kapal selam, sensor dan investasi lainnya. Masa depan lingkungan bawah laut jelas merupakan ruang di mana banyak negara regional berencana untuk beroperasi secara ekstensif (Babbage et al, 2017). SPLN sebagai pedoman kegiatan dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara harus bisa menjawab pergeseran lingkungan strategis yang dinamis, perlahan tapi pasti ke dimensi bawah permukaan, Mengingat arena konflik dalam kawasan yang terus meluas di bawah air, penguatan

bawah air dalam SPLN untuk pertahanan negara merupakan sebuah urgensi dalam menghadapi kompleksitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.

## **1.2 Fokus dan Subfokus**

Menurut Sugiyono (2013), peneliti mereduksi data dengan menentukan dan mempertimbangkan data-data yang penting, bermanfaat, dan relatif baru. Kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut, informasi yang ada dikelompok menjadi beberapa kategori yang dipilih sebagai fokus penelitian. Penentuan batas dalam penelitian berlandaskan pada level urgensi dan feasibilitas masalah yang akan diteliti. Batasan juga berkaitan dengan faktor keterbatasan peneliti dari aspek pendanaan, ketersediaan waktu, tenaga, dan jarak lokasi penelitian (Sugiyono, 2013).

Fokus dan subfokus pada penelitian bertujuan untuk memberi batasan pada penelitian kualitatif untuk memilih informasi yang relevan dan dapat dijadikan sebagai data-data pada studi yang dilakukan.

### **1.2.1 Fokus**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada kajian penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara.

### **1.2.2 Subfokus**

Berdasarkan fokus dari penelitian ini, maka dijabarkan dua poin subfokus sebagai berikut:

- a. Urgensi penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara.
- b. Penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara guna menghadapi kompleksitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian berkaitan dengan kompleksitas keamanan regional, luasnya wilayah perairan dalam batas

yurisdiksi nasional Indonesia; dan belum adanya konsep secara tegas mengenai dimensi bawah air yang tertuang dalam SPLN; maka peneliti merumuskan sebuah masalah **“Bagaimana penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara?”**.

Pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana urgensi penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara?
- b. Bagaimana penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara guna menghadapi kompleksitas keamanan kawasan Indo-Pasifik?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian seperti yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara dengan mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan:

- a. Urgensi penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara; dan
- b. Penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara guna menghadapi kompleksitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian diartikan sebagai jawaban atas tujuan penelitian yang dijabarkan melalui hasil penelitian dalam memperoleh sistem pengetahuan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah sesuai dengan yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2013). Penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan juga sebagai acuan pemecah masalah yang berkesesuaian.

Manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi sumbangsih akademis pada penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan diskusi penelitian sejenis selanjutnya untuk pengayaan khasanah keilmuan strategi pertahanan laut.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini ditunjang dengan pendekatan teori – teori terkait pertahanan negara, yang difokuskan pada penguatan dimensi bawah air dalam strategi pertahanan laut nusantara, dengan membahas pembangunan aset dan postur pertahanan bawah air sebagai saran kebijakan beserta pengelolaan hukumnya. Kajian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi stake holder pertahanan mulai dari penyelenggara kebijakan di kementerian terkait, pelaksana kebijakan, perumus dan pelaksana strategi, serta penegakan hukum dengan dimensi bawah air dalam Strategi Pertahanan Laut Nusantara.